

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Setelah Kamboja mendapatkan kemerdekaan dari penjajahan Perancis 1953 yang dipimpin oleh Raja Norodom Sihanouk, Upaya Perancis untuk memaksakan kembali dominasi kolonialnya atas Indochina setelah Perang Dunia Kedua menandai bangkitnya gerakan perlawanan di bekas jajahan Perancis tersebut. Di negara tetangganya, Vietnam, gerakan komunis Indochina meluncurkan Viet Minh yang berhasil mengalahkan upaya Prancis untuk mendapatkan kembali kendali atas wilayah Utara Vietnam. Kekalahan di Dien Bien Phu pada tahun 1954 mengakhiri Upaya kolonial Perancis. Di Kamboja, gerakan komunis merupakan cikal bakal perlawanan Vietnam. Khmer Issarak, demikian sebutan mereka saat itu, adalah kelompok yang sangat kecil dan memiliki sedikit hubungan dengan kaum tani (Bertrand, 2013).

Pada Desember 1978 Vietnam menginvasi negara tetangganya Kamboja yang menggulingkan rezim Pol Pot dan Khmer Merah serta membentuk pemerintahan baru Republik Rakyat Kamboja (People's Republic of Kampuchea). Negara-negara ASEAN termasuk Indonesia menunjukkan ketidaksetujuannya terhadap aksi menginvasi negara lain tersebut (Hughes, 1996). Sedangkan, PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa) secara konsisten menentang rezim baru yang didukung Vietnam karena dianggap ilegal dan terus mengakui pemerintahan Kamboja Demokratik yang diprakarsai Khmer Merah, yang memegang kursi sebagai perwakilan resmi Kamboja di PBB hingga tahun 1982. Kepemimpinan Republik Rakyat Kamboja dipegang oleh orang Kamboja tetapi pasukan Vietnam tetap bertahan sampai tahun 1989. Heng Samrin memimpin pemerintahan sampai tahun 1985 ketika Hun Sen, yang sebelumnya menjabat sebagai menteri luar negeri, menggantikannya sebagai perdana menteri. Meskipun

rezim ini berkontribusi besar dalam memulihkan stabilitas dan membangun kembali perekonomian, rezim ini dianggap sebagai negara boneka Vietnam.

Eksil Kamboja anti-Vietnam dan Khmer Merah berusaha mendapatkan dukungan untuk menggulingkan rezim yang didukung Vietnam. Sihanouk mendukung Khmer Merah dari pengasingannya di Beijing setelah Lon Nol menggulingkannya pada 1970. Pada 1982 Ia membentuk pemerintahan koalisi baru di pengasingan yang disebut "Pemerintahan Koalisi Kampuchea Demokratik/ *Coalition Government of Democratic Kampuchea* (CGDK)" sebuah koalisi yang terdiri dari Khmer Merah dan kekuatan royalis serta nasionalis. Khmer Merah mendominasi koalisi, sementara Sihanouk dan partai-partai anti-komunis memiliki pengaruh kecil dalam koalisi. Namun Sihanouk adalah pemimpin CGDK dan memberikan legitimasi terhadap kelanjutan Khmer Merah di PBB.

Pemerintahan yang disokong Vietnam tidak dapat bertahan lama, dan tekanan meningkat terhadap perjanjian yang ditengahi secara internasional untuk mengatur penarikan diri dan pembentukan pemerintahan baru di Kamboja. Perundingan internasional dimulai pada tahun 1988 berdasarkan inisiatif yang melibatkan pemerintah-pemerintah Asia Tenggara tetapi diperluas dan dipindahkan ke Paris pada tahun 1989 ketika negara-negara besar ikut terlibat. Dengan dukungan Tiongkok, Khmer Merah tidak bisa dikesampingkan. Pol Pot menggunakan kesempatan ini untuk mengatur kembali kekuatan militernya dan mendapatkan kembali kekuasaan yang kuat di pedesaan, ketika pasukan Vietnam mulai mundur.

Sesuai dengan *Paris Agreements* yang ditanda tangani pada Oktober 1991 dibentuklah pembentukan misi perdamaian PBB untuk memfasilitasi transisi ke arah perdamaian, stabilitas, dan demokrasi untuk Kamboja yakni *United Nations Transitional Authority in Cambodia* (UNTAC) bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu dan membentuk pemerintahan baru. UNTAC yang dipimpin oleh Yasushi Akashi dan yang dibentuk oleh PBB sebagai pemerintahan sementara di Kamboja merupakan salah satu bentuk

operasi PBB yang berfungsi untuk menjaga perdamaian. Periode ini berlangsung dari bulan November 1991 hingga September 1993. Partai Royalis FUNCINPEC (*Front uni national pour un Cambodge indépendant, neutre, pacifique, et coopératif*) memenangkan 45 persen suara melawan Partai Rakyat Kamboja/*Cambodia People's Party* (CPP) yang meraih 38 persen pada pemilu, pemerintahan baru membentuk koalisi pembagian kekuasaan yang mencakup dua perdana menteri serta perwakilan yang setara di dalam kabinet, FUNCINPEC sebagai partai dengan suara terbanyak menyetujui rencana tersebut.

Keberhasilan UNTAC membentuk pemerintahan baru di Kamboja ialah hasil dari berbagai macam komponen anggotanya yang berasal dari berbagai macam negara, Indonesia sendiri mengirimkan ribuan personil baik sipil maupun militer dalam misi UNTAC ini seperti Kontingen Garuda A dibawah letkol Erwin Sudjono di Phnom Penh, Kontingen Garuda XII-D di Kompong Thom dan Kontingen Garuda yang ditempatkan di berbagai wilayah di Kamboja. Dalam misi tersebut terdapat 2 tokoh berkewarganegaraan Indonesia sebagai pejabat senior dalam misi tersebut yakni Achmad Padang sebagai Gubernur UNTAC untuk provinsi Takeo dan Benny Widyono sebagai Gubernur UNTAC untuk provinsi Siem Reap, Keduanya membantu direktur UNTAC Yasuhiro Akashi dalam menyelesaikan konflik di Kamboja. Hingga saat ini, kajian akademik mengenai peran individu asal Indonesia dalam struktur sipil PBB masih sangat terbatas, khususnya mengenai kontribusi langsung mereka dalam penyelesaian konflik berskala internasional. Peneliti merasa perlu adanya sebuah penelitian tentang orang Indonesia yang duduk di pejabat senior UNTAC yang memiliki peran penting dalam misi perdamaian PBB tersebut.

Alasan memilih tokoh Benny Widyono yakni tidak seperti Achmad Padang, Benny Widyono menuliskan pengalamannya pada memoirnya berjudul "*Dancing in shadows : Sihanouk, the Khmer Rouge, and the United Nations in Cambodia*" serta aktif menulis tentang UNTAC salah satunya yakni Bab UNTAC dalam buku "The Oxford Handbook of United

Nations Peacekeeping Operations”. Benny Widyono, warga negara Indonesia menjabat sebagai diplomat dan ahli ekonomi PBB di Bangkok, Santiago, New York dan Kamboja antara tahun 1963 dan 1997. Pada tahun 1992-1993 ia menjabat sebagai Gubernur UNTAC Provinsi Siem Reap yang berbatasan langsung dengan Thailand; selanjutnya pada tahun 1994-1997 ia menjabat sebagai Perwakilan Politik Sekretaris Jenderal PBB untuk Pemerintah Kerajaan Kamboja.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti berpendapat perlu adanya penelitian adanya untuk mengetahui peranan penting Benny Widyono dalam Pemerintahan Transisi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Kamboja, maka akan menggambarkan bagaimana UNTAC melakukan pemerintahan transisi untuk membentuk pemerintahan baru Kamboja menuju perdamaian, stabilitas, dan demokrasi untuk Kamboja serta mendamaikan pihak-pihak yang berkonflik. Meskipun perannya sangat penting, banyak orang belum mengenal Benny Widyono dengan baik. Oleh karena itu, Melalui penelitian ini, dapat ditemukan berbagai kontribusi dan tantangan yang dihadapi Benny Widyono, serta dampaknya terhadap proses transisi di Kamboja. Ini tidak hanya akan meningkatkan pemahaman terhadap sejarah Kamboja, tetapi juga memberikan penghargaan pada peran diplomat Indonesia dalam mendukung perdamaian dan demokrasi di tingkat internasional.

UNTAC (*United Nations Transitional Authority in Cambodia*) adalah salah satu misi perdamaian terbesar yang pernah dilaksanakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Misi ini muncul sebagai hasil dari Perjanjian Damai Paris 1991 yang bertujuan untuk mengakhiri konflik berkepanjangan di Kamboja, termasuk genosida di bawah rezim Khmer merah dan perang saudara yang menghancurkan. UNTAC diberi mandat untuk mengatur pemerintahan sementara, melucuti senjata, memulangkan pengungsi, serta menyelenggarakan pemilu yang bebas dan adil. Namun, implementasi misi ini menghadapi berbagai tantangan, seperti keberadaan kelompok bersenjata Khmer merah, infrastruktur yang hancur, serta konflik kepentingan politik di antara faksi-faksi Kamboja.

Dalam konteks ini, Benny Widyono, seorang diplomat asal Indonesia yang bertugas sebagai direktur provinsi UNTAC di Siem Reap, memainkan peran yang signifikan. Ia bertanggung jawab atas wilayah yang strategis namun penuh tantangan, karena selain menjadi pusat budaya dengan keberadaan Angkor Wat, Siem Reap juga merupakan salah satu basis utama Khmer Merah. Pengalaman Benny dalam menangani isu-isu kompleks di provinsi ini menjadi contoh penting dari bagaimana pendekatan diplomasi dan administrasi yang sensitif terhadap budaya lokal dapat membantu misi internasional mengatasi hambatan di lapangan.

Penelitian tentang peran Benny Widyono menjadi penting untuk memahami bagaimana individu dapat memengaruhi keberhasilan misi multilateral yang kompleks. Sebagai orang Asia Tenggara, Widyono mampu menjembatani perbedaan antara aktor internasional dan masyarakat lokal. Hal ini memberikan wawasan yang berharga tentang pentingnya pendekatan diplomasi yang inklusif dan adaptif dalam misi-misi perdamaian modern.

Selain itu, UNTAC adalah salah satu eksperimen besar dalam diplomasi multilateral yang hasilnya masih diperdebatkan hingga kini. Melalui studi kasus peran Widyono, penelitian ini dapat mengevaluasi keberhasilan dan kegagalan UNTAC, baik dalam aspek pelucutan senjata, pemilu, maupun rekonsiliasi politik. Lebih jauh lagi, penelitian ini juga berkontribusi pada kajian sejarah tentang peran komunitas internasional dalam mendukung rekonstruksi Kamboja pascakonflik.

Penelitian semacam ini pernah dibahas oleh Ni Luh Kerti Maryasih (2001) dalam tesisnya berjudul “Intervensi PBB Dalam Proses Penyelesaian Konflik Di Kamboja Periode 1990-1993” jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu politik, Universitas Indonesia yang menjelaskan tentang intervensi yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam

konflik Kamboja dan menjelaskan keberhasilan intervensi PBB dalam menjalankan misi UNTAC sebagai operasi penjaga perdamaian PBB di Kamboja dalam proses penyelesaian konflik dan Maradona A. Runtukahu (2009) dalam tesisnya berjudul “Peran Indonesia Dalam Proses Penyelesaian Konflik Kamboja 1984-1991” jurusan ilmu politik, Fakultas Ilmu sosial dan politik, Universitas Indonesia, yang menjelaskan tentang peran Indonesia sebagai mediator dalam konflik Kamboja.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Fokus penelitian ini secara tematis ialah mengenai peranan Benny Widyono sebagai direktur setingkat gubernur di Provinsi Siam Reap dalam *United Nations Transitional Authority in Cambodia* (UNTAC) dalam kurun waktu 1992–1993. Tahun 1992 diambil dimana Benny Widyono mendapatkan mandat sebagai direktur provinsi setingkat gubernur UNTAC di Siem Reap, di Kamboja pada April 1992. Sedangkan 1993 adalah tahun berakhirnya mandat UNTAC pada 26 September 1993.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dasar pemikiran dan pembatasan masalah di atas, maka perumusan masalah dalam skripsi ini adalah

1. Bagaimana awal terlibatan Benny Widyono dalam UNTAC (1992-1993) ?
2. Bagaimana peran Benny Widyono dalam UNTAC (1992-1993) ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran Benny Widyono sebagai Gubernur Provinsi UNTAC di Siem Reap dalam pelaksanaan mandat utama misi PBB di Kamboja tahun 1992–1993, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu dan repatriasi pengungsi. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji tantangan dan dinamika yang dihadapi Benny Widyono selama menjalankan tugasnya sebagai bagian dari struktur kepemimpinan UNTAC dalam konteks transisi politik dan sosial pascakonflik di Kamboja.

2. Kegunaan

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah kajian dapat menjadi sumber informasi dan menambah wawasan tentang sejarah biografi tokoh.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran dan salah satu referensi serta sumber literatur baru dalam perkuliahan Prodi Pendidikan Sejarah dalam sejarah biografi tokoh dan sejarah Asia Tenggara.

D. Metode dan Bahan Sumber

1. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis. Metode historis adalah metode penelitian dan penulisan sejarah dengan menggunakan cara, prosedur ataupun teknik yang sistematis sesuai dengan asas dan aturan sejarah (Kuntowijoyo, 2005). Metode historis dibagi menjadi lima tahap yakni pemilihan topik, heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi.

a. Pemilihan Topik

Dalam tahap pertama dalam metode historis adalah pemilihan topik. Menurut Kuntowijoyo, topik sebaiknya dipilih berdasarkan kedekatan emosional dan kedekatan intelektual. Kedekatan emosional dalam penelitian ini dipertimbangkan karena peneliti memiliki minat yang tinggi terhadap isu-isu perdamaian dan diplomasi internasional, khususnya yang melibatkan peran Indonesia di kancah global. Peneliti merasa bangga bahwa seorang tokoh asal Indonesia seperti Benny Widyono mampu memainkan peran penting dalam misi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui *United Nations Transitional Authority in Cambodia* (UNTAC). Keterlibatan seorang diplomat Indonesia dalam misi besar seperti UNTAC memberikan inspirasi tersendiri bagi peneliti sebagai mahasiswa sejarah untuk menggali lebih dalam tentang peran tokoh-tokoh nasional dalam sejarah dunia.

Sementara itu, kedekatan intelektual didasari oleh latar belakang peneliti sebagai mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah yang memiliki ketertarikan pada kajian sejarah internasional, terutama di kawasan Asia Tenggara. Peneliti melihat bahwa historiografi Indonesia masih minim dalam mengangkat tokoh-tokoh yang berkontribusi di luar negeri dalam kerangka misi internasional. Oleh karena itu, peneliti terdorong untuk turut melengkapi kekayaan kajian sejarah Indonesia dengan

mengangkat topik mengenai Benny Widyono, yang sebelumnya belum dibahas secara mendalam dalam karya ilmiah sejarah, khususnya terkait perannya sebagai gubernur provinsi UNTAC di Kamboja pada masa transisi 1992–1993.

b. Heuristik

Dalam tahap heuristik, yakni mencari dan mengumpulkan sumber-sumber yang relevan dengan tema penelitian, baik berupa sumber primer maupun sumber sekunder. Pada Tahapan ini mengumpulkan sumber-sumber relevan dari Perpustakaan Nasional Indonesia, Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta, dan buku koleksi pribadi peneliti . peneliti menggunakan sumber primer yakni memoir dari Benny Widyono berjudul “*Dancing in Shadows: Sihanouk, the Khmer Rouge, and the United Nations in Cambodia*” yang menceritakan pengalaman hidupnya saat menjadi pegawai urusan sipil PBB dalam misi perdamaian UNTAC di Kamboja. Selain itu, peneliti menggunakan pula sumber sekunder meliputi buku tentang sejarah Kamboja, majalah, serta artikel surat kabar dan kliping yang peneliti peroleh di perpustakaan nasional Indonesia.

c. Verifikasi

Tahap ketiga yakni verifikasi adalah berupa kritik sumber. Tahap kritik sumber bertujuan untuk menguji keaslian dan kredibilitas sumber yang dikumpulkan. Langkah yang dilakukan dalam kritik sumber adalah kritik secara ekstren maupun intern. Kritik esktern ini adalah proses verifikasi keaslian dan otentisitas sumber. Kritik esktern dilakukan secara tidak langsung karena sumber-sumber penelitian ini didapatkan dari buku-buku yang terdapat di Perpustakaan Nasional RI, Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta, serta kliping hibah CSIS (Centre for Strategic and International Studies) dan surat kabar di Perpustakaan Nasional RI Salemba sehingga sumber-sumber sudah telah diverifikasi oleh lembaga-lembaga tersebut.

Kritik intern yang dilakukan peneliti yakni membandingkan konteks dan isi dari berbagai macam sumber seperti buku yang berjudul “*Dancing in Shadows: Sihanouk, the Khmer Rouge, and the United Nations in Cambodia*” karya Benny Widyono dan buku “*Pasang Surut Hubungan Diplomatik Indonesia Kamboja*” karya Nazaruddin Nasution serta artikel surat kabar salah satunya berjudul “Pangeran Jawa di Mata Raja Kamboja” oleh Julius Pour, dalam surat kabar Kompas 6 April 1996 untuk mengetahui kebenaran dari sumber yang telah diperoleh tentang Benny Widyono sebagai gubernur UNTAC di Siem Reap.

d. Interpretasi

Dalam tahap keempat yakni interpretasi, peneliti menafsirkan hasil-hasil yang didapatkan dari sumber yang telah dikritik secara saksama. Hasil-hasil tersebut berbentuk tulisan deskriptif. Tulisan deskriptif tersebut kemudian menjadi isi dalam bahasan (batang tubuh) skripsi yang diolah dalam tahap historiografi.

e. Historiografi

Pada tahap kelima yakni historiografi, peneliti menuliskan hasil-hasil yang didapat dalam tahap interpretasi hingga menjadi sebuah tulisan sejarah. Dalam penulisan ini, peneliti lebih mengarah kepada penulisan deskriptif naratif, yakni tulisan yang isinya mengarah kepada pemaparan kronologis berdasarkan sumber-sumber yang ditelaah menggunakan metode historis.

Adapun jenis historiografi dibuat ialah biografi tokoh, Biografi yakni catatan hidup seseorang meskipun sangat kecil ia menjadi bagian kepingan Sejarah yang lebih besar (Kuntowijoyo, 2003) dengan biografi dapat dipahami para pelaku Sejarah, zaman yang menjadi latar belakang, lingkungan sosial-politiknya, maka penulisan biografi diharapkan untuk mengetahui dan merekam kejadian dan situasi serta mendalami aspek-

aspek struktural yang mengelilingi kehidupan sang tokoh yang dituliskan (Abdullah et al., 1994)

2. Sumber Sejarah

Sumber yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer yang digunakan adalah buku *Dancing in Shadows: Sihanouk, the Khmer Rouge, and the United Nations in Cambodia* yang ditulis langsung oleh Benny Widyono berdasarkan pengalamannya selama menjabat sebagai gubernur provinsi UNTAC di Siem Reap. Selain itu, digunakan pula dokumen dan artikel resmi seperti *UNTAC as a Paradigm: A Flawed Success* oleh Ken Berry, serta arsip dari PBB dan liputan media internasional mengenai pelaksanaan pemilu dan repatriasi pengungsi di Kamboja.

Sedangkan sumber sekunder yang digunakan antara lain adalah buku *The Oxford Handbook of United Nations Peacekeeping Operations* yang memuat analisis tentang pelaksanaan misi UNTAC secara keseluruhan. Tesis dari oleh Ni Luh Kerti Maryasih (2001) berjudul “Intervensi PBB Dalam Proses Penyelesaian Konflik Di Kamboja Periode 1990-1993” jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu politik, Universitas Indonesia. Penulis juga menggunakan artikel berjudul *UNTAC: ‘International Triumph’ in Cambodia* sebagai bahan pendukung dalam menilai efektivitas pelaksanaan mandat PBB di Kamboja. Selain itu, digunakan pula artikel daring, jurnal, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema peran individu dalam misi perdamaian PBB dan rekonstruksi pascakonflik di Kamboja.